



PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT



# 2022 | LAPORAN KINERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANAH LAUT



# DAFTAR ISI

Halaman

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
DASAR HUKUM .....	2
B. STRUKTUR ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI.....	3
C. ISU STRATEGIS.....	7
D. PRODUK DAN LAYANAN .....	7
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	<b>11</b>
A. Visi .....	11
B. Misi .....	11
C. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	15
D. Indikator Kinerja Utama.....	16
E. Perjanjian Kinerja.....	19
F. Program dan Kegiatan.....	22
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>24</b>
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi.....	24
Sasaran RPJMD.....	24
Eselon II (Kepala Dinas) .....	31
Eselon III (Sekretaris).....	39
Eselon III (Kabid Pendaftaran Penduduk).....	43
Eselon III (Kabid Pencatatan Sipil).....	45
Eselon III (Kabid PIAK).....	47
Eselon IV (Kasubag Umpeg).....	50
Eselon IV (Kasubag Perenc dan Keu).....	53
B. Akuntabilitas Keuangan	55

	1. Anggaran dan Realisasi APBD 2022	55
	2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program	57
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>74</b>
	A. KESIMPULAN .....	74
	B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA .....	74

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas Pemerintah merupakan perwujudan dan kewajiban instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Laporan Kinerja SKPD dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai, Laporan Kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Bertitiktolak dari RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023, Rencana kerja (RENJA) dan memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 berikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RENSTRA, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran, dengan demikian laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan kegiatan SKPD pada Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 5 ) ;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

Adapun Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut adalah:

- (1) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah; dan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan anggaran;
  - b. Pengelolaan keuangan;
  - c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang

milik negara;

- d. Pengelolaan urusan ASN;
  - e. Penyusunan perencanaan dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  - f. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  - g. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
  - h. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
  - i. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
  - j. Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;
  - k. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
  - l. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  - m. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
- (3) Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- (4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :

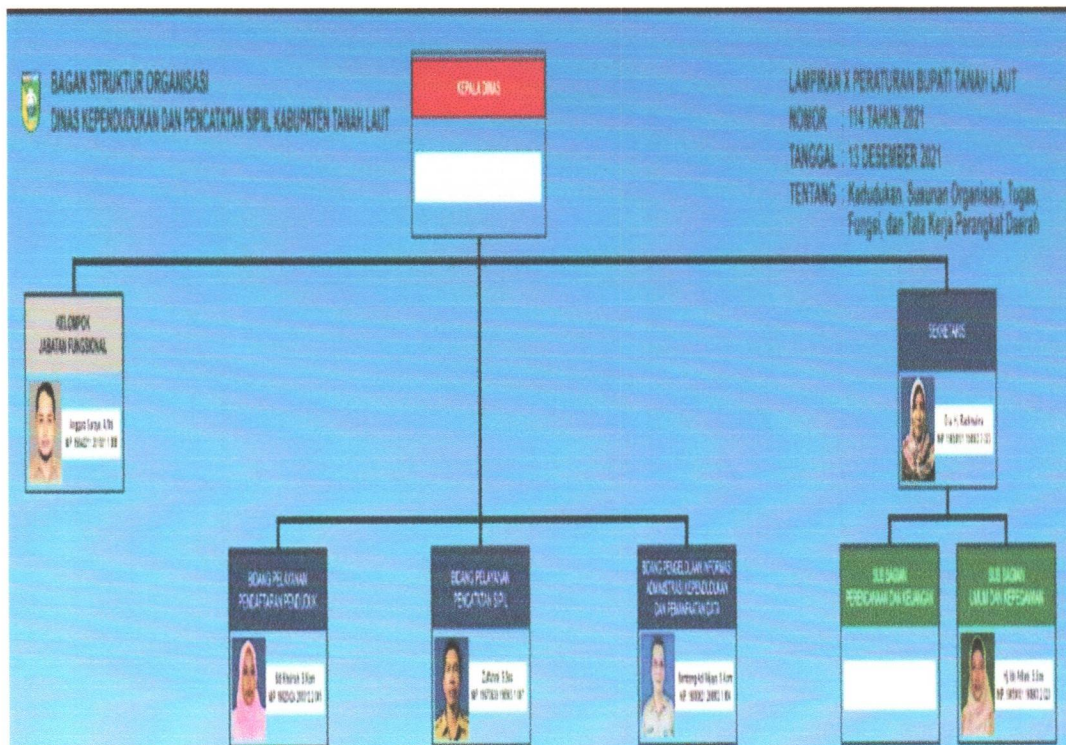
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri :
  - a. Subbag Perencanaan dan Keuangan

- b. Subbag Umum dan Kepegawaian
- 3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- 4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
- 5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional
  - a. Kepegawaian

Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2022 berjumlah 59 Orang terdiri dari 23 PNS dan 36 orang tenaga PTT dengan perincian sebagai seperti tabel berikut :

1.	Kepala Dinas	:	- orang
2.	Sekretaris	:	1 orang
	a. Kasubbag Umum Kepegawaian	:	1 orang
	Staf	:	3 orang
	b. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	:	- orang
	Staf	:	4 orang
3.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	:	1 orang
	a. Pranata Komputer Muda	:	1 orang
	b. Pranata Komputer Muda	:	1 orang
	c. Pranata Komputer Muda	:	1 orang
	Staf	:	2 orang
		:	
		:	

4.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil a. Pranata Komputer Muda b. Pranata Komputer Muda c. Pranata Komputer Muda Staf	: : : : :	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang - orang
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemfaatan Data a. Pranata Komputer Muda b. Pranata Komputer Muda c. Pranata Komputer Muda Staf	: : : : :	1 orang 1 orang 1 orang 2 orang



Kondisi sarana dan prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yaitu memiliki sebuah gedung kantor dengan luas tanah 649 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagah Pelaihari. Dari beberapa sarana prasarana yang dimiliki terdapat beberapa peralatan yang kondisinya masih layak pakai dan terdapat beberapa peralatan yang sudah tidak layak pakai lagi. Sedangkan untuk fasilitas kendaraan dinas baik roda 4 maupun roda 2 serta beberapa peralatan

penunjang lainnya perlu penambahan hal ini dilakukan dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan operasional.

### **C. Isu Strategis**

Pada bagian ini akan diuraikan isu strategis paling krusial tentang layanan dasar berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD melalui penilaian terhadap capaian kinerja.

Isu strategis diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya isu tersebut.

Identifikasi isu- isu strategis pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja kegiatan dan hasil evaluasi kegiatan tahunan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Peningkatan kapasitas SDM dan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan;
4. Peningkatan aksesibilitas terhadap tempat pelayanan;
5. Pengembangan teknologi pengelolaan dan penelusuran arsip dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
6. Peningkatan kesadaran sebagian penduduk akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan; dan
7. Peningkatan kerjasama pemanfaatan data kependudukan.

### **D. Produk dan Layanan**

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dalam menjalankan tugas dan fungsi pada tahun 2022 telah berpedoman pada :

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan

undang jenis layanan yang yang dilaksanakan yaitu :

- a. Pelayanan Pada Bidang Pendaftaran Penduduk, meliputi :
  - Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
  - Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
  - Penerbitan surat keterangan pindah warga negara republik indonesia (SKPWI);

- Penerbitan KIA
  - Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan Lainnya
  - Pelaporan Peristiwa Kependudukan
  - Pelaporan Pendataan Penduduk
- b. Pelayanan pada Bidang Pencatatan sipil
- Kelahiran
  - Lahir Mati
  - Perkawinan
  - Pembatalan Perkawinan
  - Perceraian
  - Pembatalan Perceraian
  - Kematian
  - Pengangkatan Anak
  - Pengakuan Anak
  - Pengesahan Anak
  - Perubahan Nama
  - Perubahan Status Kewarga Negara
  - Pembetulan Akta
  - Pembatalan Akta
  - Peristiwa Penting Lainnya

Produk yang dihasilkan dari jenis layanan diatas adalah Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah sesuai dengan perubahan elemen data penduduk yang wajib dimiliki.

## **E. Sistematika Penyajian**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 berpedoman pada Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 065/00901/ORG tanggal 06 Januari 2023 perihal Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) SKPD Tahun 2022, sebagai berikut :

1. DAFTAR ISI
2. RINGKASAN EKSEKUTIF

Daftar Isi :

### **Bab I. Pendahuluan**

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi
- C. Isu Strategis
- D. Produk dan Layanan
- E. Sistematika Penyajian

### **Bab II. Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja**

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan dan Sasaran Strategis
- D. Indikator Kinerja Utama
- E. Perjanjian Kinerja
- F. Program dan Kegiatan

### **BAB III. Akuntabilitas Kinerja**

- A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
  1. Sasaran RPJMD
  2. Eselon II (Kepala Dinas)
  3. Eselon III (Sekretaris) terdiri dari :
    - A. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - B. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan
  4. Eselon III (Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk)
  5. Eselon III (Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil)
  6. Eselon III (Kabid Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan)
- B. Akuntabilitas Keuangan
  1. Anggaran dan Realisasi APBD 2022
  2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

### 3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan 2022

#### **BAB IV. PENUTUP**

- A. Simpulan
- B. Strategi Peningkatan Kerja

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. IKU
- 2. Pernyataan Hasil Reviu
- 3. Pernyataan Perjanjian Kinerja 2022 bertanda tangan
- 4. Cascading / Pohon Kinerja
- 5. Capaian Per Triwulan (1-4)
- 6. Monev Renstra
- 7. Matrik Keselarasan

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. VISI RPJMD

Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yaitu “  
TERWUJUDNYATANAH LAUT YANG BERINTERAKSI “

1. Pernyataan visi ini mengandung makna untuk menghadirkan Kabupaten Tanah Laut yang harmonis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman guna merajut kebersamaan dalam keberagaman, meletakkan keadilan dalam pembangunan untuk pemerataan kemakmuran rakyat, merangkul komitmen seluruh stakeholder dalam kemuliaan integritas guna membangun Kabupaten Tanah Laut yang sejahtera dan tujuan mulia pembangunan untuk mewujudkan kehidupan yang berkualitas di segala aspek. Sedangkan makna yang terkandung dalam **BERINTERAKSI**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Berkarya
- 2) Berinovasi
- 3) Tertata
- 4) Religius
- 5) Aktual
- 6) Sinergi

#### B. MISI RPJMD

Guna mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut ditetapkan misi sebagai berikut :

Penjabaran MISI 1 :

1. Berkarya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Berkarya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Berkarya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang berbasis

teknologi. Penjabaran MISI 2 :

1. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat.
2. Berinovasi untuk melahirkan industri kreatif.

Penjabaran MISI 3 :

1. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government).
2. Menerapkan prinsip-prinsip orang yang tepat dan cerdas pada jabatan yang selaras di dalam pemerintahan.

Penjabaran MISI 4 :

1. Relegius dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupan beragama.

Penjabaran MISI 5 :

1. Membangun sinergitas yang baik dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Desa, Kelurahan dan Kecamatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan yang terkait dengan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut adalah :

#### **1. Misi Pertama**

***Dengan penjabaran misi yaitu “Berkaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan Pelayanan Masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya “ dengan sasaran terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat dengan berbasis teknologi informasi.***

#### **2. Misi Kedua**

***Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif “***

dengan sasaran Menciptakan Inovasi – Inovasi Layanan Berbasis Teknologi Informasi untuk mempermudah, mempercepat dan memperluas capaian akses masyarakat dalam mendapatkan layanan dokumen administrasi kependudukan atau dalam bahasa teknologinya layanan dalam genggaman.

### **3. Misi Ketiga : Tertata**

**Dengan penjabaran misi yaitu MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNMENT )**

Terkait dengan misi ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah laut dalam memberikan pelayanan menerapkan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan selalu melakukan koordinasi kepada seluruh pemangku kebijakan yang memiliki kepentingan bersama dan memiliki kesamaan pandangan.

Untuk mewujudkan Misi tersebut ada beberapa faktor pendukung yang perlu dilakukan yaitu :

1. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi atau SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk melaksanakan penanganan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Indonesia secara bersamaan dan dimanfaatkan oleh seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia.,
2. Meningkatkan penyebaran informasi, kepedulian, dan peran serta masyarakat dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Masyarakat belum semuanya mengetahui tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karena itu perlu diadakan penyebaran informasi tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada setiap kesempatan. Dan selanjutnya warga masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan peran sertanya dalam penanganan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena tanpa kepedulian dan peran serta masyarakat tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itu harus diupayakan bagaimana agar masyarakat mau peduli dan berperan serta dalam penanganan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3. Meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait.

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan program yang harus ditangani oleh berbagai pihak. Oleh sebab itu perlu adanya kerjasama dengan pihak yang berwenang dan terkait dengan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### **C. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Penetapan tujuan organisasi merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan, dan berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi serta merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.

Tujuan-tujuan strategis yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikaitkan dengan misi adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya sistem Pelayanan administrasi kependudukan yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
3. Terwujudnya layanan administrasi kependudukan berbasis teknologi
4. Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien
5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di SKPD
6. Terwujudnya sumber daya aparatur Kependudukan dan pencatatan sipil dengan jumlah memadai

Sasaran Strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang periode capaiannya lebih pendek yaitu paling lama satu tahun. Secara keseluruhan sasaran dan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
2. Meningkatnya cakupan penerbitan dokumen administrasi kependudukan;
3. Meningkatnya cakupan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
4. Meningkatnya penduduk yang mempunyai dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Meningkatnya sistem informasi kependudukan dan data kependudukan;
6. Meningkatnya penggunaan layanan kepengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil berbasis teknologi;

7. Meningkatnya kerjasama pemanfaatan data;
8. Meningkatnya kelancaran Administrasi Umum dan Kepegawaian;
9. Meningkatnya kelancaran administrasi perencanaan dan keuangan;
10. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja SKPD;
11. Meningkatnya hasil evaluasi RB;
12. Meningkatnya hasil evaluasi zona integritas WBK / WBBM;
13. Meningkatnya Kualitas SDM Kependudukan dan pencatatan sipil.

#### D. Indikator Kinerja Utama

Pada bagian ini dijelaskan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan dalam RPJMD, dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil diperlukan sebuah tolak ukur yang jelas dan nyata agar pelaksanaan pembangunan dapat terarah dan fokus pada tujuan sehingga dapat memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut lima tahun kedepan.

Selengkapnya indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berikut Tabel Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target-target yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun.

Tabel (Tujuan, Indikator, Target, Sasaran, Indikator Target 5 Tahun)

No	Tujuan	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	Kondisi kinerja pd awal periode RPJMD	Target Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja pd akhir periode RPJMD
							2019	2020	2021	2022	2023	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Terwujudnya sistem Pelayanan administrasi kependudukan yang efektif dan efisien	IKM	81,3 % (baik)	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	IKM	80	84	84	85	86	87	87	
					Meningkatnya cakupan penerbitan dokumen administrasi kependudukan	Persentasi penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					KK								
					KTP								
					KIA								
					SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN								
					Persentasi Laporan Peristiwa Kependudukan (Pindah Datang)								
			Persentasi penerbitan laporan pendataan kependudukan										
			100%	Meningkatnya cakupan penerbitan dokumen pencatatan sipil	Persentasi penerbitan dokumen Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
					KELAHIRAN								
					LAHIR MATI								
					PERKAWINAN								
					PEMBATALAN PERKAWINAN								
					PERCERAIAN								
PERUBAHAN PERCERAIAN													
					PERUBAHAN KEMATIAN								
					PENGANGKATAN ANAK								
					PENGAKUAN ANAK								
					PENGESAHAN ANAK								
					PERUBAHAN NAMA								
					PERUBAHAN STATUS KEWARGA NEGARAAN								
					PEMBETULAN AKTA								
					PEMBATALAN AKTA								
					PERISTIWA PENTING LAINNYA								
2.	Terwujudnya peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentasi kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	99%	Meningkatnya penduduk yang mempunyai dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk atas kepemilikan dokumen kependudukan	50	60	70	80	85	99	99	
					KK								

				KTP								
				KIA								
				SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN								
				Persentasi Kepemilikan dokumen CAPIL : KELAHIRAN	50	10	10	10	10	10	10	99
				LAHIR MATI								
				PERKAWINAN								
				PEMBATALAN PERKAWINAN PERCERAIAN								
				PEMBATALAN PERCERAIAN KEMATIAN								
				PENGANGKATAN ANAK PENGAKUAN ANAK PENGESAHAN ANAK								
				PERUBAHAN NAMA								
				PERUBAHAN STATUS KEWARGA NEGERAAN								
				PEMBETULAN AKTA PEMBATALAN AKTA								
				PERISTIWA PENTING LAINNYA								
3.	Terwujudnya layanan administrasi kependudukan berbasis teknologi	Persentasi pengelolaan Sistem SIAK dan Sistem Informasi Pengelolaan data serta pemanfaatan Data Kependudukan	95%	Meningkatnya sistem informasi kependudukan dan data kependudukan	Persentasi laporan data kependudukan berbasis "SIAK"	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Meningkatnya pengguna layanan kepengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil berbasis teknologi.	1. Persentasi pengguna layanan kepengurusan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0%	25%	70%	75%	80%	85%	90%
				meningkatnya kerjasama pemanfaatan data	2. Persentasi meningkatnya inovasi layanan dan kerjasama pemanfaatan data	0%	3 buah (20%)	3 buah (20%)	3 buah (20%)	3 buah (20%)	3 buah (20%)	15 inovasi (100%)
					Persentasi SKPD yang memanfaatkan data kependudukan	0%	5	5	8	10	12	40 SKPD (100%)

4.	Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien	Persentasi pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian, perencanaan yang tertib	100%	Meningkatnya kelancaran Administrasi Umum dan Kepegawaian	Persentasi kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentasi pengelolaan Kepegawaian yang tertib	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Meningkatnya kelancaran Administrasi keuangan dan perencanaan	Persentasi pengelolaan Administrasi keuangan dan perencanaan yang tertib dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi SKPD	100%	Meningkatnya kuantabilitas Kinerja SKPD	Predikat SAKIP	75 BB	75 BB	75 BB	80 A	80 A	90 AA	90 AA
				Meningkatnya hasil evaluasi RB	Nilai Hasil Evaluasi RB minimal "BB"	75 BB	75 BB	75 BB	80 A	80 A	90 AA	90 AA
				Meningkatnya hasil evaluasi zona integritas WBK / WBBM	Nilai Hasil Evaluasi Zona Integritas	75 BB	75 BB	75 BB	80 A	80 A	90 AA	90 AA
6.	Terwujudnya sumber daya aparatur Kependudukan dan pencatatan sipil dengan jumlah memadai	Persentasi meningkatnya kompetensi Kependudukan dan pencatatan sipil	100%	Meningkatnya Kualitas SDM Kependudukan dan pencatatan sipil	Persentasi pemenuhan SDM Kependudukan dan pencatatan sipil yang bersertifikat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan SKPD karena merupakan proses tentang memberikan gambaran mengenai apa yang diinginkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan akan berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut mengacu pada dokumen Renstra, Renja dan DPA Tahun 2022 dan perubahannya serta hasil reuiu . perjanjian kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### Eselon II (Kepala Dinas)

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	IKM	86
2	Meningkatnya penduduk yang mempunyai dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk atas kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	85%

### Eselon III (Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk)

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penerbitan dokumen administrasi kependudukan	Persentase penerbitan dokumen pendaftaran penduduk (KK,KTP-el,KIA, Surat Keterangan Kependudukan)	100%
		Persentase penerbitan laporan pendataan penduduk	100%
		Persentase laporan peristiwa kependudukan (pindah datang)	100%

### Eselon III (Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil)

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penerbitan dokumen pencatatan sipil	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil (kelahiran, lahir mati, perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, pembetulan akta, peristiwa penting lainnya	100%

### Eselon III (Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data)

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya sistem informasi kependudukan dan data kependudukan	Persentase laporan data kependudukan berbasis SIAK	100%
2	Meningkatnya pengguna layanan kepengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil berbasis teknologi	Persentase pengguna layanan kepengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	80%
		Persentase meningkatnya inovasi layanan kerjasama dan pemanfaatan data	20%
3	Meningkatnya kerjasama pemanfaat data	Persentase SKPD yang memanfaatkan data kependudukan	100%

### Eselon III (Sekretaris)

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kelancaran administrasi umum dan kepegawaian	Persentase kelancaran administrasi perkantoran yang baik dan tepat waktu	100%
		Persentase pengelolaan kepegawaian yang tertib	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Predikat SAKIP	80 A
3	Meningkatnya hasil evaluasi RB	Nilai hasil evaluasi RB	80 A
4	Meningkatnya hasil evaluasi ZI WBK/WBBM	Nilai hasil evaluasi ZI	80 A
5	Meningkatnya kelancaran administrasi keuangan dan perencanaan	Persentase pengelolaan administrasi keuangan dan perencanaan yang tertib dan tepat waktu	100%
6	Meningkatnya kualitas SDM kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase pemenuhan SDM kependudukan dan pencatatan sipil yang bersertifikat	100%

### Eselon IV (Kasubag Perencanaan dan Keuangan)

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	7 dok
2	Menyusun dokumen laporan kinerja, pengendalian dan revidi SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun SKPD sesuai ketentuan	3 dok
3	Menyusun dokumen SAKIP SKPD	Jumlah dokumen SAKIP SKPD	7 dok
4	Penyusunan dokumen laporan keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	19 dok

### Eselon IV (Kasubag Umum dan Kepegawaian)

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Melakukan layanan administrasi perkantoran	Jumlah administrasi perkantoran sesuai SOP	2568
2	Penyusunan dokumen kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun dengan baik dan tepat waktu	102
3	Melaksanakan pemeliharaan sapsas	Jumlah sapsas yang dipelihara dengan baik dan dapat dimanfaatkan	87
4	Melaksanakan pengelolaan arsip	Jumlah surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	1894
5	Pemenuhan SDM kependudukan dan pencatatan sipil yang bersertifikat	Jumlah SDM dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang bersertifikat	5

## **F. Program dan Kegiatan dan Anggaran**

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Laut pada tahun 2022 menetapkan 4 program, 9 kegiatan dan 19 sub kegiatan yaitu :

- I. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota dengan anggaran Rp. 1.000.000
  1. Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan anggaran Rp. 1.000.000
    - Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan anggaran Rp. 1.000.000
  2. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dengan anggaran Rp. 4.878.451.893
    - Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan anggaran Rp. 4.876.451.893
    - Sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD dengan anggaran Rp. 2.000.000
  3. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan anggaran Rp. 1.894.371.252
    - Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dengan anggaran Rp. 6.432.978
    - Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran Rp. 1.112.147.906
    - Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran Rp. 94.198.885
    - Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan anggaran Rp. 681.591.483
  4. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan anggaran Rp. 1.241.674.109
    - Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan anggaran Rp. 246.189.333
    - Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran Rp. 995.484.776
  5. Kegiatan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah dengan anggaran Rp. 636.114.070

- Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan anggaran Rp. 36.995.703
  - Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan anggaran Rp. 55.000.000
  - Sub kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan anggaran Rp. 243.315.800
  - Sub kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi sapras gedung kantor atau bangunan lainnya dengan anggaran Rp. 300.802.567
- II. Program Pendaftaran Penduduk dengan anggaran Rp. 370.088.205
1. Kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk dengan anggaran Rp. 370.088.205
    - Sub kegiatan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk dengan anggaran Rp. 360.207.950
    - Sub kegiatan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan dengan anggaran Rp. 9.880.255
- III. Program Pencatatan Sipil dengan anggaran Rp. 146.199.310
1. Kegiatan pelayanan pencatatan sipil dengan anggaran Rp. 146.199.310
    - Sub kegiatan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting dengan anggaran Rp. 20.165.795
    - Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil dengan anggaran 126.033.515
- IV. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dengan anggaran Rp. 276.170.566
1. Kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan dengan anggaran dengan anggaran Rp. 23.156.664
    - Sub kegiatan pengolahan dan penyajian data kependudukan dengan anggaran Rp. 23.156.664
  2. Kegiatan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dengan anggaran Rp. 253.013.902
    - Sub kegiatan fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dengan anggaran Rp. 253.013.902

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Pemerintah Daerah.

Pada Tahun 2022 Anggaran untuk pendukung Tugas Fungsi Disdukcapil Kabupaten Tanah Laut pada DPA murni sebesar Rp 8.154.693.461,- dan pada bulan Oktober Terbit DPA Perubahan Anggaran Tahun 2022 dengan Perubahan Anggaran sebesar Rp. 9.444.069.405,- ada penambahan sebesar Rp. 1.289.375.944,- Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar 8.474.507.702,- atau 89,73% dengan realisasi fisik 100%. Untuk mencapai target indikator sasaran telah melakukan baik di kesekretariatan maupun di bidang - bidang, kegiatan – kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan
- 2) Pelayanan Penerbitan dokumen Pencatatan Sipil
- 3) Penyediaan data kependudukan berbasis SIAK yang yang akurat
- 4) Pelayanan kerjasama pemanfaatan data kependudukan

#### 1. Sasaran RPJMD

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah yang dalam pelaksanaannya dimaksudkan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 berdasarkan pada Renstra 2018- 2023 telah melakukan perjanjian kinerja tahun 2022.

Dengan mengacu pada Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023. Dinas Dukcapil merupakan salah satu SKPD yang melaksanakan Sasaran RPJMD:

- 1) Misi ke 1 RPJMD yaitu Berkarya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
- 2) Misi 2 RPJMD yaitu Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industry kreatif dan.
- 3) Misi 3 RPJMD yaitu Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*). Berikut adalah tabel sasaran RPJMD tahun 2022 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut:

**Tabel Sasaran RPJMD, Target dan Capaian Tahun 2022**

No.	MISI RPJMD	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	1	2	3	4	5	6
	Misi 1					
1	Tujuan 3: Peningkatan kualitas layanan masyarakat lainnya secara merata dan terjangkau untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya	Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	100	100%
	Misi 2					
2	Tujuan 1: Peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik	Sasaran 1.1: Meningkatnya inovasi pelayanan publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan	100	100	100%
	Misi 3					

3	Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik ( <i>Good Governance</i> )	Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian, perencanaan yang tertib.	Persentase pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian, perencanaan yang tertib	100	100	100%
---	---	---	--	-----	-----	------

Beberapa hal yang dapat dijelaskan dari capaian kinerja tersebut di atas adalah :

- 1) Misi ke 1 RPJMD yaitu Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

**Sasaran 1** : Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya **Indikator** : Cakupan penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sesuai dengan Perpres 96 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk bahwa dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil itu Adalah:

KTP, KK, KIA Pindah (SKPWNI), Surat Keterangan Kependudukan, Akta Kelahiran, Perkawinan dari hasil pelayanan permintaan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2022 sebanyak 51.313 Permohonan dan yang terbit sebanyak 51.313 Dokumen dengan presentasi (100%).

Dari pelayanan tersebut diatas dan diambil dari Sistem Administrasi Kependudukan maka diperoleh data sebagai berikut :

**Tabel data**

Tabel data Pencetakan Dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022

No	Uraian	Pemohon	Terbit
1	KTP	24.461	24.461
2	AKte kelahiran	8.138	8.138
3	KIA	7.591	7.591
4	KK (penerbitan no KK baru)	1.772	1.772
5	Pindah	7.146	7.146
7	Akta Perkawinan (non muslim)	38	38
8.	Akta Perceraian	2	2
9	Akta Kematian	2.165	2.165
Total		51.313	51.313

Sumber data : siak Tahun 2022

2) Misi 2

Tujuan 1: Peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik

**Sasaran 1.1:** Meningkatnya inovasi pelayanan publik

**Indikator :** Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan Sampai dengan tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan pelayanan kepada publik mempunyai 9 (sembilan) inovasi, yang adanya offline dan online.

Dari 9 tersebut yang telah didaftarkan sebanyak 1 inovasi dan terintegrasi dengan Dinas Kominfo dan masuk dalam layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Berikut data inovasi layanan kependudukan.

**Tabel Inovasi**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

No	Nama Inovasi	Keterangan
1	Two In One (2 in 1), Tree In One (3 in 1) dan Four In One (4 in 1)	Layanan terintegrasi dalam 1 pengajuan permohonan langsung terbit beberapa dokumen yang terpengaruh akibat perubahan peristiwa penting maupun peristiwa kependudukan
2	Layanan Sehari Tuntung (LASUNG)	Layanan sehari tuntung
3.	Layanan Kunjungan (LANJUNG)	Layanan berkunjung kerumah rumah warga yang tua, sakit, difabel, dan gangguan jiwa
4.	SYPEDE (Sistem Informasi Pemanfaatan Data Kependudukan)	Layanan melakukan kerjasama antara dinas kependudukan dan pencatatan sipil dengan Lembaga/ instansi lain.
5.	LAKSA (Layanan Administrasi Kependudukan Setiap Ahad)	Pelayanan Administdasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap hari minggu diruang terbuka hijau untuk memberikan kemudahan bagi warga yang sibuk dan hanya memiliki waktu libur dihari minggu Saja
6.	SIKIJANG MAS (Sistem Pelayanan KIA melalui	Inovasi ini sudah dikembangkan dan terakomodir di Inovasi SiLakas

	Jaringan Media Sosial)	
7.	DETAK (Desa Tertib Administrasi Kependudukan)	Desa Terib Administrasi Kependudukan ini adalah sebuah inovasi yang mana layanan dilakukan didesa yang mana desa tersebut semua penduduknya memiliki semua dokumen kependudukan yang lengkap
8.	SIKECE (Sistem Informasi pengarsipan Dokumen Kependudukan Secara Elektronik). Digital	Karena tidak memiliki gedung arsip dan sulitnya pencarian arsip secara fisik maka dibuatlah sebuah inovasi pengarsipan secara elektronik yang nantinya akan terintegrasi dengan aplikasi layanan untuk mengarsip setiap dokumen pengajuan layanan
9.	SILAKAS (system Informasi Layanan Administrasi Kependudukan Via Smartphone). Digital	Silakas adalah sebuah aplikasi yang dibuat untuk memudahkan layanan yang berbasis Online yang mana pelayanan ini juga memiliki dampak untuk menghentikan calo dan pungli, karena pelayanan dilakukan tanpa tatapmuka

*Sumber data: Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data*

Sedangkan tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan pelayanan kepada publik mempunyai 3 (empat) inovasi dan inovasi ini telah didaftarkan ke Dinas Kominfo Kabupaten tanah Laut. Sehingga jumlah inovasi sampai dengan tahun 2022 sebanyak 12 (dua belas) buah, untuk Inovasi Silakas (Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan Via Smartphone) berhasil mendapatkan penghargaan terbaik 2 (dua) dalam Kalsel Inovation Award tahun 2022 yang dilaksanakan di Gedung Idham Khalid pada tanggal 10 Agustus 2022 lalu.

## Tabel Inovasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

1.	SIMPEL (Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan)	Yaitu sebuah aplikasi dimana setiap lini proses, sejak penerimaan berkas, verifikasi petugas penerima, verifikasi dari pejabat verifikator, proses dokumen oleh operator, pemberitahuan status dokumen kepada pemohon, sampai pada penyerahan dokumen dapat dilakukan dalam aplikasi yang Terintegrasi
2.	PELANGI PAGI (Pelayanan Terintegrasi dengan Pengadilan Negeri)	Yaitu layanan yang terintegrasi dengan pengadilan negeri yang apabila terjadi perubahan elemen data yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri maka dokumen kependudukannya akan langsung diubah oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanpa penduduk harus datang melakukan pengurusan ke Disdukpencahil.
3.	SI CAPUNG (Sistem Informasi Cerai Di Pengadilan Agama, Dokumen Kependudukan Berubah Langsung)	Yaitu layanan yang terintegrasi dengan pengadilan agama yang apabila terjadi perubahan status perceraian yang telah diputuskan oleh pengadilan agama maka dokumen kependudukannya akan langsung diubah oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanpa penduduk harus datang melakukan pengurusan ke Disdukpencahil.

*Sumber data: Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data, 2022*

### 3) Misi 3

Tujuan 1: Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

Sasaran 1.1: Persentasi pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian, perencanaan yang tertib.

**Tabel data pencapaian Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	1	Nilai Reformasi Birokrasi	80	96,86	121%
		2	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP SKPD	80	79,5 (BB)	99,37%
		3	Nilai Hasil Evaluasi ZI SKPD	80	95,08 (WBK)	118%

### 4) Sasaran Eselon II (Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Laut)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagaimana Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani pada Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil	IKM	84	86,49	102,9%	84	90,91	108,2%	86	91,89	108,8%
2.	Meningkatnya Penduduk yang Mempunyai Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentasi Penduduk atas Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	70	98	140%	75	99,94	133,2%	85	99,94	117,5%

Pada tabel diatas dapat dilihat perbandingan pada indikator kinerja eselon II yaitu nilai IKM tahun 2020 dengan capaian 102,9%, tahun 2021 dengan capaian 108,2% dan tahun 2022 dengan capaian 108,8%, hal ini menggambarkan terjadinya peningkatan capaian kepuasan masyarakat terkait pelayanan publik.

1. Sasaran pertama Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada Indikator Kinerja Indek Kepuasan Masyarakat (IKM).

Pada Tahun 2022 Disdukcapil Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tugas dan fungsinya telah melakukan pelayanan penerbitan dukumen kependudukan dan cacatan sipil, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan 4 (empat) Program, yaitu :

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.775.159.431,- terealisasi sebesar Rp. 3.399.147.199 atau 90,03%
2. Program pendaftaran penduduk dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 370.088.205,- terealisasi sebesar Rp. 325.228.288,- atau 87,87%
3. Program pencatatan sipil dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 146.199.310,- terealisasi sebesar Rp. 107.936.400,- atau 73,82%
4. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 276.170.566,- terealisasi sebesar Rp. 250.335.736,- atau 90,64%.

Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM Kesekretariatan sebanyak 6 orang PNS dan 3 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Untuk mencapai indikator ini didukung oleh 25 orang SDM dari bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang PIAK dan Bidang Pencatatan Sipil.

Tahun 2021, untuk mencapai indikator IKM Disdukcapil melakukan survey terkait layanan kepada pengguna layanan yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan. Dari hasil survey layanan tersebut nilai nya adalah 90,91 dengan kategori baik rekomendasi kantor yang tidak refersentatif dan alat perekaman yang kurang dan telah ditindak lanjuti dengan pembangunan gedung kantor ditempat referensentatif dan dilahan yang sesuai dan alat perekaman sudah diadakan.

Sedangkan untuk Tahun 2022, untuk mencapai indikator IKM Disdukcapil melakukan survey terkait layanan kepada pengguna layanan yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan. Dari hasil survey layanan tersebut nilai nya adalah 91,89 dengan kategori sangat baik. Terdapat rekomendasi hasil survey yang masih kurang, yaitu pada unsur layanan penanganan pengaduan dengan nilai nilai rata- rata 3,340 atau dengan nilai skm 83,5, pada dasarnya nilai tersebut sudah berada pada mutu pelayanan Baik hanya saja perlu ditingkatkan lagi, terdapat rekomendasi yang perlu dilakukan pada unsur layanan penanganan pengaduan yaitu yang sebelumnya tidak ada petugas khusus dan sekarang sudah ditunjuk dan ditetapkan petugas khusus untuk melayani setiap pengaduan masyarakat terkait layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil baik pengaduan secara offline maupun online, hal tersebut dapat dilihat dari table dibawah :

Tabel NRR dan SKM 9 (sembilan) unsur layanan tahun 2022

No	Unsur layanan	NRR	SKM
1	Persyaratan	3,747	93,67
2	Prosedur	3,613	90,32
3	Waktu penyelesaian	3,720	93
4	Biaya	3,813	95,32
5	Produk layanan	3,660	91,5
6	Kompetensi pelaksana	3,767	94,17
7	Perilaku pelaksana	3,647	91,17
8	Penanganan pengaduan	3,340	83,5
9	Sarana dan prasarana	3,807	95,17

Dengan Dukungan Anggaran yang diberikan diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah laut melakukan kegiatan – kegiatan untuk mendukung tercapainya IKM dengan hasil sangat Baik sebagai berikut :

1. Melengkapi sarana dan prasarana pada Dinas Kependudukan dan

pencatatan Sipil agar tercipta suasana pelayanan yang sangat nyaman.

2. Memberikan Layanan Kunjungan ke Desa- Desa, Sekolah dan Rumah – rumah Warga berkebutuhan khusus sebagai sarana lain dalam pengurusan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Menambah fitur – fitur pada Aplikasi sebagai sarana pengajuan pembuatan Dokumen Kependudukan agar semakin mudah digunakan bagi pengguna layanan.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bagi Pelaksana baik itu Front Office maupun Back Office agar mempercepat setiap proses penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Menjalinkan kerjasama dengan pihak ke 3 sebagai prasarana pengantaran dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang tidak bisa mengambil Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipilnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun dikecamatan sehingga diantar kerumah warga langsung dengan biaya jauh dekat Rp. 10.000,-
6. Membangun Aplikasi yang dapat memfasilitasi masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan secara online dan dapat mengetahui sampai dimana proses pengajuan dokumen kependudukannya.
7. Menetapkan petugas khusus untuk penanganan pengaduan terkait layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Kendala-kendala yang dialami untuk pencapaian indikator tersebut antara lain :

1. Kurangnya sarana terkait alat rekam KTP-elektronik yang ditempatkan di kecamatan, hal tersebut agar mempermudah masyarakat dalam melakukan perekaman KTP-elektronik sehingga masyarakat tidak perlu lagi ke Dinas Dukcapil untuk melakukan perekaman KTP-elektronik.
2. Sumber daya manusia yang ada masih terbatas atau belum mencukupi terutama pada Operator SIAK dan Front Office.

Solusi yang dilakukan antara lain :

1. Melakukan layanan kunjungan ke desa, sekolah dan rumah warga penyandang disabilitas, lansia serta warga yang memiliki keterbelakangan mental (Odj) terutama perekaman KTP-elektronik, hal tersebut dilakukan untuk percepatan kepemilikan KTP-elektronik.
  2. Selalu mengajak setiap ASN baik PNS maupun PTT untuk lebih meningkatkan kemampuan kerja dengan bekerja cepat, tepat dan akurat walaupun SDM terbatas.
2. Sasaran kedua Meningkatnya Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pada Tahun 2021 Disdukcapil Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tugas dan fungsinya telah melakukan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil untuk mendapatkan jumlah kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yaitu sebagai berikut :

- Kepemilikan KTP-el : 247.221 atau 98,48%
- Kepemilikan Akta Kelahiran 0-17 Tahun : 105.874 atau 98,01%
- Kepemilikan KIA 0-16 Tahun : 43.397 atau 41,92%
- Kepemilikan Kartu Keluarga : 108.493 atau 91,93%
- Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim : 3.245 atau 100%
- Kepemilikan Akta Kematian : 1.336 atau 100%
- Kepemilikan Akta Kelahiran : 174.983 atau 50,21%
- Kepemilikan Akta Perceraian : 3.626 atau 100%

*Sumber Data Bidang PIAK*

Pada Tahun 2022 dari permohonan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil Seperti KK dari permohoan 1.772 tercetak 1.772 dengan Persentasi 100% (Penerbitan KK baru), Perekaman KTP- el dari permohoan 24.461 tercetak 24.461 dengan Persentasi 100%, SKPWNI (Pindah Domisili) dari permohoan 7.146 tercetak 7.146 dengan

Persentasi 100%, KIA dari permohonan 7.591 tercetak 7.591 dengan Persentasi 100%, Akta Kelahiran dari permohonan 8.138 tercetak 8.138 dengan Persentasi 100%, Akta Perkawinan dari permohonan 38 tercetak 38 dengan Persentasi 100%, Akta Kematian dari permohonan 2.165 tercetak 2.165 dengan persentasi 100%, Akta Perceraian dari permohonan 2 tercetak 2 dengan persentasi 100%.

**Tabel data Tabel data Penerbitan Dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun sampe dengan Tahun 2022**

No	Uraian	Jumlah Pengajuan Penerbitan	Jumlah Penerbitan	Capaian
1	KTP	24.461	24.461	100%
2	Akta kelahiran	8.138	8.138	100%
3	KIA	7.591	7.591	100%
4	KK	1.772	1.772	100%
5	Pindah	7.146	7.146	100%
7	Akta Perkawinan	38	38	100%
8	Akta Perceraian	2	2	100%
9	Akta Kematian	2.165	2.165	100%

*Sumber data : siak Tahun 2022*

Untuk mencapai kedua indikator tersebut didukung dengan Program-program antara lain :

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.775.159.431,- terealisasi sebesar Rp. 3.399.147.199 atau 90,03%
2. Program pendaftaran penduduk dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 370.088.205,- terealisasi sebesar Rp. 325.228.288,- atau 87,87%
3. Program pencatatan sipil dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 146.199.310,- terealisasi sebesar Rp. 107.936.400,- atau 73,82%
4. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 276.170.566,- terealisasi sebesar Rp. 250.335.736,- atau 90,64%

Pada tahun 2022 untuk mencapai indikator ini didukung juga 23 orang PNS dan 36 PTT.

Untuk mencapai target sasaran pada Indikator Kinerja Persentasi Penduduk

atas Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melakukan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kerjasama dengan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri untuk layanan terintegrasi dimana ketika masyarakat mengurus layanan di Pengadilan Agama ataupun di Pengadilan Negeri selain mendapatkan hasil layanan dari kedua instansi tersebut, masyarakat juga mendapatkan dokumen kependudukan hasil dari perubahannya atau sesuai dengan putusan dari instansi tersebut.
- b. Mengikuti Kegiatan Manunggal Tuntung Pandang yang mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Melaksanakan pelayanan pengurusan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Meningkatkan Inovasi DETAK (Desa Tertib Administrasi Kependudukan) dari 5 Desa di tahun 2020, ditambah 27 Desa sehingga dari tahun 2020 sampai dengan 2021 berjumlah 32 dan Tahun 2022 ada 3 kecamatan dengan 37 desa yang telah Tertib Administrasi Kependudukannya. Yang mana Inovasi ini sangat membantu masyarakat karena kegiatan dilaksanakan langsung ke Desa sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya satu sen pun atau 0 rupiah baik itu untuk biaya transportasi dan lainnya jika mereka harus datang sendiri ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk mengurus Dokumen Kependudukannya. Selain memberikan Layanan penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga dengan memberi edukasi kepada masyarakat untuk bisa mengurus dokumen lainnya seperti halnya mencatatkan perkawinannya jika pernikahannya tidak tercatat.
- d. Layanan kunjungan untuk lansia, disabilitas dan Orang dengan gangguan jiwa. Hal ini sangat ramah terhadap masyarakat dengan kebutuhan khusus yang berhak mendapatkan Dokumen kependudukan sebagai dasar untuk mendapatkan layanan publik lainnya.

Kendala-kendala dalam mencapai target Indikator ini antara lain :

- 1) Masih ada penduduk yang belum paham penggunaan Smartphone untuk menggunakan layanan online dan juga masih ada daerah yang belum terjangkau jaringan seluler.

Solusi :

1) Melaksanakan layanan kunjungan

Rencana Aksi :

- a. Melakukan layanan kunjungan ke Desa – desa yang belum terjangkau jaringan seluler.

### 3. Eselon III

#### a. Sekretaris

Unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program kerja dan anggaran, administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.

Sesuai Rencana Strategis Tahun 2018-2023 yang telah disusun Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan 6 (Enam) sasaran Strategis dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja, yaitu :

**Tabel pencapain indikator sasaran**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya kelancaran Administrasi Umum dan Kepegawaian	Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan tepat waktu	100 %	86,49%	86,49%	100 %	86,49%	86,49%	100 %	100 %	100%
		Persentase pengelolaan Kepegawaian yang tertib	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja SKPD	Predikat SAKIP	Baik (75)	Baik (75)	100 %	Baik (75)	Sangat Baik (84.24)	112 %	Baik (75)	Baik (79,5)	100 %
3.	Meningkatnya hasil evaluasi RB	Nilai Hasil Evaluasi RB minimal "BB"	Baik (75)	Baik (75)	100 %	Baik (75)	Sangat Baik (91.00)	121 %	Baik (75)	Sangat Baik (96,94)	129 %
4.	Meningkatnya hasil evaluasi zona integritas WBK / WBBM	Nilai Hasil Evaluasi Zona Integritas	Baik (75)	WBK	100%	Baik (75)	WBK (95,08)	100%	Baik (75)	Sangat Baik (95.08)	100%
5.	Meningkatnya kelancaran Administrasi keuangan dan perencanaan	Perentase pengelolaan Administrasi keuangan dan perencanaan yang tertib dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

6.	Meningkatnya Kualitas SDM Kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase pemenuhan SDM Kependudukan dan pencatatan sipil yang bersertifikat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
----	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Tahun 2021, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan beberapa Program dan Kegiatan, yaitu :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota dengan anggaran sebesar Rp. 6.937.558.881,- dan terealisasi sebesar Rp 6.200.993.943,- atau (89,38%)
2. Program pencatatan sipil dengan anggaran sebesar Rp. 126.115.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 104.298.950,- atau (82,70%)
3. Program pendaftaran penduduk dengan anggaran sebesar Rp. 554.663.900,- terealisasi sebesar RP. 438.368.985,- atau (79,03%)
4. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dengan anggaran sebesar Rp. 991.796.020,- dan terealisasi sebesar Rp. 971.269.246,- atau (97,93%)

Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM Kesekretariatan sebanyak 6 orang PNS dan 7 orang PTT dengan jumlah 13 orang.

Sedangkan Tahun 2022 untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan 4 Program, yaitu :

- 1.) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota dengan anggaran sebesar Rp 8.651.611.324,- dan terealisasi sebesar Rp 7.791.007.311,- atau (90,05%)

- 2.) Program pendaftaran penduduk dengan anggaran sebesar Rp. 370.088.205,- dan terealisasi sebesar Rp. 324.708.255,- atau (87,73%)
- 3.) Program pelayanan pencatatan sipil dengan anggaran Rp. 146.199.310,- dan terealisasi sebesar Rp. 108.456.400,- atau (74,18%)
- 4.) Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 276.170.566,- dan terealisasi sebesar 250.335.736,- atau (90,64%)

Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM Kesekretariatan sebanyak 6 Orang PNS dan 7 Orang PTT.

Bila dibanding tahun 2022 mengalami peningkatan realisasi anggaran sebesar 0,13% sedangkan jumlah SDM Kesekretariatan tidak mengalami peningkatan atau pengurangan.

#### a. Kinerja Sekretariat

Sasaran Sekretaris ada 6 (enam) dengan 7 (tujuh) Indikator kinerja pada kesekretariatan, yaitu :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya kelancaran pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian	Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan tepat waktu	100 %	86,49%	86,49%	100 %	86,49%	86,49%	100 %	100 %	100%
		Persentase pengelolaan Kepegawaian yang tertib	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja SKPD	Predikat SAKIP	Baik (75)	Baik (75)	100 %	Baik (75)	Sangat Baik (84.24)	112 %	Baik (75)	Baik (79,5)	100 %
3.	Meningkatnya hasil evaluasi RB	Nilai Hasil Evaluasi RB minimal "BB"	Baik (75)	Baik (75)	100 %	Baik (75)	Sangat Baik (91.00)	121 %	Baik (75)	Sangat Baik (96,94)	129 %
4.	Meningkatnya hasil evaluasi zona integritas WBK / WBBM	Nilai Hasil Evaluasi Zona Integritas	Baik (75)	WBK	100%	Baik (75)	WBK (95.08)	100%	Baik (75)	Sangat Baik (95.08)	100%

5.	Meningkatnya kelancaran Administrasi keuangan dan perencanaan	Perentase pengelolaan Administrasi keuangan dan perencanaan yang tertib dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6.	Meningkatnya Kualitas SDM Kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase pemenuhan SDM Kependudukan dan pencatatan sipil yang bersertifikat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Pada Indikator Persentase kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik dan tepat waktu, semua surat masuk yang ditargetkan dapat tercapai. Layanan surat menyurat dengan target 2.166 yang ditetapkan dan terealisasi 2.166. Persentase pengelolaan Kepegawaian yang tertib dapat diartikan bahwa jumlah pegawai yang naik pangkat ataupun berkala dapat terselesaikan dengan baik melalui aplikasi symponi. Untuk indikator kinerja Predikat SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meraih nilai 79,05(BB) artinya belum bisa mencapai target nilai 80,tetapi jika dibandingkan dengan PTSP dengan nilai SAKIP 74,5 (BB) lebih tinggi sebesar 4,55 point,demikian juga untuk Nilai RB 96,86 dengan predikat Sangat Baik dari target 80 dan untuk Zona Integritas dengan Nilai 90,03 predikat WBK dari target 80.Untuk nilai RB pun Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil meraih nilai lebih tinggi dibanding PTSP,dimana nilai RBnya sebesar 88,24 (BB) selisih 8,62 poin. Tetapi untuk nilai ZI Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berada dibawah PTSP dimana nilai ZI nya sebesar 93,83 atau 3,8 poin. Persentase pemenuhan SDM Kependudukan dan pencatatan sipil yang bersertifikat terealisasi 100%. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Kapasitas Aparatur untuk ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah dilaksanakan pada bulan November 2022 yang diikuti seluruh ASN dan Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perencanaan yang tertib dan tepat waktu dapat berjalan dengan optimal dan menyajikan laporan yang valid dengan dokumen pendukung yang menyajikan informasi yang transparansi dan akuntabel.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 target 5 (lima) dokumen Pelaporan Keuangan dengan realisasi 5(lima) atau dengan capaian 100%.5 (lima) Jenis Laporan Keuangan yaitu :

1. CALK
2. Laporan Keuangan Bulanan
3. Laporan Keuangan Triwulan
4. Laporan Keuangan Semesteran
5. Laporan Keuangan Tahunan

**b. Kinerja Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

Sasaran 1 (satu) dengan 3 (tiga) Indikator kinerja pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, yaitu :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penerbitan dokumen pendaftaran penduduk (KK, KTP-el, KIA, Surat Keterangan Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penerbitan laporan pendataan penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase laporan peristiwa kependudukan (Pindah Datang)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdapat peningkatan cakupan kepemilikan Dokumen pendaftaran penduduk adapun kenaikannya sebesar 2% dari 97% ke 99%. Pada Tahun 2022 dan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk didukung dengan 1 program dan 2 kegiatan dengan besaran anggaran sebesar Rp. 370.088.205 terealisasi sebesar Rp. 324.708.255,- atau sebesar 87,73 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp. 554.663.900,- dengan realisasi Rp. 438.368.985 atau 79,03% ada penurunan besaran anggaran dan besaran realisasi keuangan yang hal ini dikarenakan wabah COVID 19 belum berakhir. Akan tetapi dengan jumlah dana yang diberikan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk masih bisa merealisasikan Kinerja 100%

dari target yang dibuat.

Berikut tabel pencapaian kinerja Bidang Dafduk :

Indikator 1 : Persentase penerbitan dokumen pendaftaran penduduk (KK, KTP- EL,KIA,Surat Keterangan Kependudukan)

No	Indikator	Uraian	Jumlah permohonan	Jumlah yang diterbit	Capaian
1	Persentase penerbitan dokumen pendaftaran penduduk (KK, KTP-EL,KIA, Surat Keterangan Kependudukan)	KK	1.772	1.772	100%
		KTP	-	-	100%
		KIA	7.591	7.591	100%
		Pindah	7.146	7.146	100%

Indikator 2 : Persentasi penerbitan laporan Pendataan.

No	Indikator	Uraian	Jumlah	Jumlah yang terbit	Capaian
	Persentasi penerbitan laporan Pendataan penduduk	Laporan Pendataan Penduduk	12 Dokumen	12 Dokumen	100%

Indikator 3 : Persentasi Laporan Peristiwa Kependudukan (Pindah Datang)

No	Indikator	Uraian	Jumlah	Jumlah yang terbit	Capaian
	Persentasi Laporan Peristiwa Kependudukan (Pindah Datang)	Laporan peristiwa kependudukan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%

Untuk pencapaian target sasaran kinerja Bidang Pendaftaran Penduduk dari indikator kerjanya tercapai 100% akan tetapi ada beberapa kendala yang dihadapi dilapangan sebagai berikut :

6. Masih adanya desa yang tidak terjangkau jaringan internet sehingga saat pelayanan kunjungan tidak bisa berjalan dengan baik terutama untuk perekaman KTP el.
7. Kurangnya M2M untuk layanan perekaman KTP el sehingga pada saat penjadwalan perekaman kunjungan di beberapa tempat yang bisa meefesienkan waktu jadi terhambat.
8. Jumlah personil yang masih kurang mengakibatkan jumlah tim dalam

layanan kunjungan terbatas sehingga tidak maksimalnya pelayanan kunjungan.

Untuk menghadapi kendala – Kendala dalam pencapaian target dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkordinasi dengan desa terdekat dari desa yang tidak memiliki jaringan untuk memohon ijin memberikan tempat untuk melakukan layanan bagi desa terdekat yang tidak terjangkau jaringan internet. Kalau untuk pengajuan dokumen kependudukan lainnya yang bukan perekaman KTP EI maka bisa dilakukan dengan membawa dokumen pengajuan pembuatan Dokumen Kependudukannya dengan membawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk bisa dikerjakan dan jika telah terselesaikan diantar kembali ke desa tersebut sehingga masyarakat tidak lagi terkendala dalam kondisi apapun untuk memiliki dokumen Kependudukannya.
2. Melakukan koordinasi dengan Bidang PIAK untuk bisa disuport dengan penambahan M2M sebagai alat perekaman KTP EI agar perekaman bisa dilakukan beberapa titik sekaligus sehingga efisiensi waktu bisa berjalan cepat dan cakupan kepemilikan KTP EI tercapai 100%
3. Mengajukan ke bidang PIAK untuk bisa menambahkan Operator yang ditugaskan dalam layanan kunjungan. Akan tetapi dalam hal ini Bidang PIAK akan mengkoordinasikan kembali dengan Kesekretariatan terkait dengan penambahan PTT atau permohonan penambahan ASN harus melalui BKPSDM terlebih dahulu.

### c. Kinerja Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Sasaran 1 (satu) dengan 1 (satu) Indikator kinerja pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, yaitu :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya penerbitan dokumen pencatatan sipil	Persentase penerbitan Akta Kelahiran ,Akta Perkawinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		Akta Kematian Akta Perceraian								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

b

Bidang Pelayanan pencatatan sipil pada tahun 2022 terdapat peningkatan kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil seperti Pada Akta Kelahiran dan akta perkawinan Non Muslim juga pada Akta Kematian. Untuk Dokumen Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan hanya sesuai dengan Tabel Data Kinerja karena tidak ada permohonan lain yang diajukan sesuai dengan jenis dokumen yang telah diatur dalam Perpres 96 Tahun 2019 Tentang tatacara Pendaftaran Penduduk. Untuk mendukung pemberian layanan demi meningkatkan capaian kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Bidang Pencatatan Sipil didukung dengan anggaran sebesar Rp.126.115.500 dengan realisasi sebesar Rp. 104.298.950 atau 82,70%.

Tabel Perbandingan Capaian kenaikan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil

No	Uraian	Jumlah penerbitan tahun 2021	Jumlah penerbitan tahun 2022	Persentasi Kenaikan/penurunan %
1	Akta Kelahiran	13.987	8.138	41,8
2	Akta Perkawinan	100	38	62
3	Akta Kematian	2.576	2.165	15,9
4	Akta Perceraian	4	2	50

Untuk pencapaian target sasaran kinerja Bidang Pencatatan Sipil dari indikator kinerjanya tercapai 100%, akan tetapi ada beberapa kendala yang dihadapi dilapangan yaitu sebagai berikut :

1. Masih adanya desa yang tidak terjangkau jaringan internet sehingga saat pelayanan kunjungan tidak bisa berjalan dengan baik.
2. Jumlah personil yang masih kurang mengakibatkan jumlah tim dalam layanan kunjungan terbatas sehingga tidak maksimalnya pelayanan kunjungan

Untuk menghadapi kendala – Kendala dalam pencapaian target dilakukan dengan hal -hal sebagai berikut :

1. membawa Dokumen permohonan pembuatan Akta Pencatatan Sipil ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk bisa dikerjakan dikantor dan jika telah terselesaikan akan diantar kembali kedesa tersebut sehingga masyarakat tidak lagi terkendala dalam kondisi apapun untuk memiliki dokumen Pencatatan Sipil.

2. Mengajukan ke bidang PIAK untuk bisa menambahkan Operator yang ditugaskan dalam layanan kunjungan. Akan tetapi dalam hal ini Bidang PIAK akan mengkoordinasikan kembali dengan Kesekretariatan terkait dengan penambahan PTT atau permohonan penambahan ASN harus melalui BKPSDM terlebih dahulu.

#### d. Kinerja Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data

Sasaran 3 (tiga) dengan 4 (empat) Indikator Kinerja pada Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data, yaitu :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya system informasi kependudukan dan data kependudukan	Persentase laporan data kependudukan berbasis SIAK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya pengguna layanan kepengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil berbasis teknologi	1.Persentase pengguna layanan kepengurusan dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.		2.Persentase meningkatnya inovasi layanan dan Kerjasama pemanfaatan data	90%	90%		90%			100%		100%
3.	Meningkatnya Kerjasama pemanfaatan data	Persentase SKPD yang memanfaatkan data kependudukan	0%	100%		100%			100%		0%

ada kinerja Meningkatnya sistem informasi kependudukan dan data Kependudukan dan indikator kinerja persentasi laporan data kependudukan berbasis SIAK dengan indikator pembagi yaitu tersedianya Laporan Harian, Laporan Bulanan, Laporan Semesteran, pembuatan Data Agregat dan pembuatan Data Profile Kependudukan dengan target 100% telah tercapai realisasi sebesar 100%. Capaian tersebut tidak lepas dari tepat waktunya laporan yang disusun dan tepat waktunya permohonan penyandingan data kependudukan yang selesai.

Kemudian pada kinerja meningkatnya pengguna layanan kepengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi dengan indikator kinerja persentasi pengguna layanan kepengurusan dokumen

kependudukan dan pencatatan sipil dengan target 100% dengan indikator pembagi adalah 3,581 user yang mendaftar layanan online SILAKAS telah tercapai realisasi sebesar 100% atau sebanyak 3,581 user yang mendaftar layanan SILAKAS. Keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari terpenuhinya aplikasi layanan yang dipelihara, terpenuhinya jaringan SIAK yang dipelihara serta terpenuhinya jumlah perangkat SIAK yang dipelihara. Sejak diluncurkannya aplikasi layanan online SILAKAS di tahun 2019, terjadi peningkatan signifikan terhadap pengguna layanan tersebut. Hal ini bisa dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel penggunaan aplikasi SILAKAS

No	Tahun	Jumlah user	Kenaikan user
1	2019	38	-
2	2020	3.405	3.443
3	2021	3.581	176
4	2022	29.081	25.500

Kemudian pada indikator kinerja lainnya yaitu persentasi meningkatnya inovasi layanan dan kerjasama pemanfaatan data dengan target 100% terealisasi 100% dengan faktor pembagi yaitu jumlah inovasi yang dibuat dibagi jumlah inovasi yang dilaksanakan inovasi tersebut yaitu Manyasah (Mambari Layanan Kesekolah) ini merupakan kegiatan layanan pembuatan dokumen kependudukan ke sekolah- sekolah maupun Lembaga Pendidikan lainnya untuk melakukan perekaman KTP-elektronik dan KIA di Kabupaten Tanah Laut.

Pada Indikator meningkatnya kerjasama pemanfaatan data kependudukan, bahwa pada tahun 2022 ada 6 SKPD yang melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan namun sampai sekarang belum bisa memanfaatkan data kependudukan hal ini karena adanya Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 bahwa untuk pemanfaatan data kependudukan harus dilakukan penyesuaian/pembaharuan terhadap Perjanjian Kerjasama. Dengan adanya peraturan tersebut sampai akhir tahun 2022 baru 2 SKPD yang bisa memanfaatkan data kependudukan yaitu Dinas Sosial dan Dinas Koperasi dan Perdagangan.

Adapun target indikator kinerja persentasi SKPD yang memanfaatkan data

kependudukan tahun 2022 adalah sebesar 0% dengan faktor pembagi yaitu jumlah SKPD yang mengajukan kerjasama pemanfaatan data dibagi jumlah SKPD yang sudah memanfaatkan data kependudukan. pada tahun 2022 dari 6 SKPD yang melaksanakan PKS belum ada SKPD yang bisa memanfaatkan data dikarenakan masih belum diterbitkannya persetujuan tersebut oleh Kementerian Dalam Negeri.

Kemudian Untuk meningkatkan kembali jumlah SKPD yang memanfaatkan data kependudukan yang berdasarkan dengan Permendagri Nomor 102 tahun 2019, Bidang PIAK dan pemanfaatan data merencanakan untuk aktif berkoordinasi dengan SKPD yang memerlukan pemanfaatan data kependudukan di tahun 2023.

Pada Tahun 2022 Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data telah didukung anggaran sebesar RP. 276.170.566,- dan teralisasi sebesar Rp. 250.335.736,- atau 90,64%.

#### 4. Eselon IV

##### a. Eselon IV (Subbag Umum dan Kepegawaian)

Kinerja Strategis Kasubag Umum dan Kepegawaian tahun 2022 ada 5 sasaran dengan indikator 5 buah, sebagai berikut :

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
1.	Melakukan layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran sesuai SOP	2.568	2.568	100%
2.	Penyusunan Dokumen Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang disusun dengan baik dan tepat waktu	150	150	100%
3.	Melaksanakan Pemeliharaan Sapras	Jumlah Sapras, yang dipelihara dengan baik dan dapat dimanfaatkan	45	45	100%
4.	Melaksanakan Pengelolaan Arsip	Jumlah Surat yang Diarsipkan Sesuai Klasifikasi	1894	1894	100%
5.	Pemenuhan SDM Kependudukan dan pencatatan sipil yang bersertifikat	Jumlah SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersertifikat	59	59	100%

No.	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Administrasi umum perangkat daerah	1.894.371.252	1.726.744.893	91,15
2.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemda	1.241.674.109	1.094.942.111	88,18
3.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemda	636.114.070	574.481.795	90,31

*Tabel realisasi kegiatan 2022*

Pada tahun 2021 Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran sebanyak 5 kegiatan dan terealisasi 5 kegiatan dengan realisasi fisik 100%, Untuk mencapai indikator – indikator ini didukung dengan sub kegiatan sebagaimana tabel realisasi kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Sub kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- 2) Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- 3) Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- 4) Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- 5) Sub kegiatan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan;
- 6) Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
- 7) Sub kegiatan pengadaan mebel;
- 8) Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;
- 9) Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat;
- 10) Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik;
- 11) Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

Sedangkan SDM yang mendukung kegiatan/sub kegiatan ini sebanyak 4 (Empat) orang.

Sedangkan pada tahun 2022 target Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran sebanyak 3 kegiatan teralisasi 3 kegiatan (100%). Kegiatan tersebut adalah :

1. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
2. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;
3. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemeintah daerah;

**Tabel layanan administrasi perkantoran**

No	Nama Layanan	Jumlah	Keterangan
1	Layanan tamu	966	
2	Layanan surat menyurat	2166	Masuk : 1175 Keluar : 991
3	Layanan kebersihan kantor	12	Bulan
4	Layanan keamanan lingkungan kantor	12	Bulan
5	Layanan administrasi pengaduan	8	Buah
6	Layanan administrasi bebas temuan	32	Buah
7	Fasilitas kegiatan rapat koordinasi	12	Bulan
8	Fasilitas kegiatan PKS	12	Bulan
9	Fasilitas perbaikan jaringan internet	12	Bulan

**Tabel layanan administrasi kepegawaian**

No	Nama Layanan	Jumlah	Keterangan
1	Data DUK	2	update
2	Data naik pangkat dan berkala	11	org
3	Data Pensiun	3	org

Pada Indikator jumlah dokumen kepegawaian yang disusun dengan baik dan tepat waktu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tanah Laut telah menyelesaikan sebanyak 150 dokumen yang meliputi dokumen SKP, LHKPN, kenaikan pangkat dan berkala PNS juga menindaklanjuti surat masuk yang berkaitan dengan kepegawaian.

Tahun 2022 jumlah Sarana Prasarana yang dipelihara dengan baik dan dapat dimanfaatkan Kembali sebanyak 45 unit yang terdiri dari kendaraan roda 4 sebanyak 3 unit, kendaraan roda 2 sebanyak 7 unit, Genset sebanyak 1 unit, Ac sebanyak 18 unit, Komputer 5 unit, Laptop 6 unit, printer 4 unit dan Tower 1 unit.

Pada indikator jumlah surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyelesaikan dan mengarsipkan surat sebanyak 1.894 sesuai dengan klasifikasi dan ketentuan yang berlaku supaya memudahkan pengadministrasian dan pencarian bila dikemudian hari diperlukan. Pada indikator Jumlah SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersertifikat, pada akhir tahun 2022 telah melaksanakan Bimbingan Tehnis peningkatan Kapasitas aparatur yang diikuti sebanyak 59 ASN dan dibuktikan dengan sertifikat.

#### **b. Eselon IV (Subbag Perencanaan dan Keuangan)**

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bagian sub Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabkan dibantu oleh 1 orang staf pelaksana sebagai penyusun program dan anggaran. Pada tahun 2022 target Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang disusun dengan baik dan tepat waktu sebanyak 12 buah dan teralisasi 12 dokumen atau (100%). Untuk mencapai indikator ini didukung dengan Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan jumlah anggaran sebesar dan realisasi seperti pada tabel dibawah :

No	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1.000.000,-	996.600,-	99,66
2	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	4.776.451.893	4.391.860.112	91,94
3	Administrasi keuangan perangkat daerah	2.000.000,-	1.981.800,-	99,09

**Tabel dokumen perencanaan dan keuangan tahun 2022**

No	Nama Layanan	Jumlah	Keterangan
1	Dokumen Perencanaan	7	dok
2	Dokumen Keuangan	5	dok

## C. Akuntabilitas Keuangan

### 1. Anggaran dan Realisasi APBD 2022

#### a. Belanja Pegawai

Jumlah belanja ini dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai, pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan, berikut tabel belanja pegawai tahun 2022 :

**Tabel realisasi anggaran gaji dan tunjangan tahun 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	4.876.451.893	4.391.860.112	90,06

Total belanja gaji dan tunjangan setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 semuanya untuk belanja pegawai, yaitu berupa Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan atas beban kerja.

#### b. Belanja Modal dan Barang/Jasa

Jumlah belanja modal dan belanja barang/jasa tahun anggaran 2022 ini dipergunakan untuk membiayai program-program dan kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan Peningkatan pelayanan dan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, yang terdiri atas 4 (empat) program yang terdiri atas 9 (sembilan) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan.

Pada Tahun 2022 Anggaran untuk mendukung Tugas Fungsi Disdukcapil Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 8.154.693.461,- dan pada bulan oktober terbit DPA perubahan anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 9.444.069.405,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 8.474.507.702,- atau 89.73 % dengan realisasi fisik 100%.

Jumlah a ini dipergunakan untuk membiayai Program-Program dan kegiatan dalam rangka mendukung Peningkatan pelayanan dan kepemilikan dokumen kependudukan dan

pencatatan sipil, yang terdiri atas 4 (empat) program yang terdiri atas 9 (sembilan) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan. Berikut adalah Realisasi Belanja Disdukcapil Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 :

**Tabel Anggaran dan Realisasi berdasarkan Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022  
Setelah Perubahan Anggaran**

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
<b>A.</b>	<b>Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>1.000.000</b>	<b>996.600</b>	<b>99,66</b>
1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1.000.000	996.600	99,66
<b>B.</b>	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>4.878.451.893</b>	<b>4.393.841.912</b>	
1.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	4.876.451.893	4.391.860.112	90,06
2.	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	2.000.000	1.981.800	99,09
<b>C.</b>	<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>			
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Gedung kantor	6.432.978	5.392.000	83,81
2.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.112.147.906	964.151.700	86,69
3.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	94.198.885	81.360.100	86,37
4.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	681.591.483	675.841.093	99,15
<b>E.</b>	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>			
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	246.189.333	120.261.801	48,84
2.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	995.484.776	974.680.310	97,91
<b>G.</b>	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>			
1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	36.995.703	28.022.850	75,74
2.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan	55.000.000	53.850.695	97,91

	perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan			
3	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	243.315.800	212.497.500	87,33
4	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	300.802.567	280.110.750	93,12
<b>H</b>	<b>Pelayanan pendaftaran penduduk</b>	<b>370.088.205</b>	<b>324.708.255</b>	<b>87,73</b>
1	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	360.207.950	314.828.000	87,40
2	Pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	9.880.255	9.880.255	100
<b>I</b>	<b>Pelayanan pencatatan sipil</b>	<b>146.199.310</b>	<b>108.456.400</b>	<b>74,18</b>
1	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	20.165.795	0	0
2	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	126.033.515	108.456.400	86,05
<b>J</b>	<b>Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan</b>	<b>23.156.664</b>	<b>22.738.400</b>	<b>98,19</b>
1	Pengolahan dan penyajian data kependudukan	23.156.664	22.738.400	98,19
<b>K</b>	<b>Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan</b>	<b>253.013.902</b>	<b>227.597.336</b>	<b>89,95</b>
1	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	253.013.902	227.597.336	89,95

## 2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut melaksanakan Program dan kegiatan sesuai dengan DPAP-SKPD Tahun Anggaran 2022 dengan belanja langsung tahun anggaran 2022 ini

dipergunakan untuk membiayai program-program dan kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan Peningkatan pelayanan dan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, yang terdiri atas 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap kinerja tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan selama Tahun 2022. Sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik beserta target-targetnya adalah informasi yang diharapkan dapat diberikan melalui LKj ini.

Secara umum pencapaian kinerja sasaran dapat memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun terdapat indikator sasaran strategis yang tidak tercapai. Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggung jawabkan melalui indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah terdiri atas 4 (empat) program 9 (sembilan) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan.

#### **B. Strategi Peningkatan Kerja**

Meskipun Indikator Sasaran pada tahun 2022 dapat tercapai, namun untuk lebih meningkatkan kinerja di tahun mendatang, maka beberapa hal yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan Pelayanan Langsung Tatap Muka, layanan kunjungan dan layanan secara Online;
2. Menyempurnakan kualitas rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sasaran Rencana Strategis.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan Sosialisasi dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi.
4. Mengoptimalkan pelaksanaan Sosialisasi untuk pelaksanaan Zona Integritas Bebas Korupsi dalam Pelayanan Publik.
5. Meningkatkan kapabilitas sosialisasi agar masyarakat lebih paham tentang Administrasi Kependudukan.

